

RAHASIA



BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Jalan Harsono R.M. No.70, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta 12550

Telepon (021) 7805814, Faksimile (021) 78844104,

Website: <https://bssn.go.id>, E-mail: humas@bssn.go.id

BERITA ACARA

NOMOR: R.BA.604/BSSN/D2/PP.01.06/12/2020

TENTANG

**AUDIT PENYELENGGARAAN PERSANDIAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI GORONTALO
T.A. 2020**

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 3939.1/D2/12/2020 Tanggal 8 Desember Tahun 2020 perihal Kegiatan Audit Persandian di Pemerintah Provinsi Gorontalo T.A. 2020, pada Hari Senin Tanggal 21 Desember Tahun 2020, bertempat di Kantor Badan Siber dan Sandi Negara dan Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Mohamad Nur Afif, S.ST
NIP : 198701152007011001
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
Jabatan : Ketua Tim Audit Penyelenggaraan Persandian
Pemda Provinsi Gorontalo T.A. 2020
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara
2. Nama : Ristantoro
NIP : 19720303 199702 1 001
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Anggota Audit Penyelenggaraan Persandian
Pemda Provinsi Gorontalo T.A. 2020
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara

bertindak mewakili Badan Siber dan Sandi Negara, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA,**

3. Nama : Freksi Gani, ST.MM
NIP : 19650505 199803 2 006
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I (IV/b)

RAHASIA

Jabatan : Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik
Instansi : Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Provinsi Gorontalo

4. Nama : Muksi K. Malabar, S.IP
NIP : 19720610 199302 1 002
Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Kepala Seksi Pos Telekomunikasi dan
Persandian, Bidang Informasi Komunikasi
Publik
Instansi : Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Provinsi Gorontalo
5. Nama : Suharto M. Suma
NIP : 19660424 19908 1 002
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Staf pada Seksi Pos Telekomunikasi dan
Persandian, Bidang Informasi Komunikasi
Publik
Instansi : Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Provinsi Gorontalo

bertindak mewakili Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**,

menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA telah melaksanakan Audit Penyelenggaraan Persandian melalui metode *desktop/off site* pada tanggal 10 Desember 2020.
2. Dalam melaksanakan Audit Penyelenggaraan Persandian sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, PIHAK PERTAMA telah melakukan penilaian atas pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Urusan Persandian dengan area sebagai berikut:
 - a. Profil Penyelenggara Persandian;

- b. Tata Kelola dan Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian;
 - c. Pengelolaan Sumber Daya Persandian; dan
 - d. Operasional Persandian.
3. Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, PIHAK PERTAMA telah melaksanakan pemeriksaan atas hasil penilaian mandiri dan dokumen/berkas yang dikirim oleh PIHAK KEDUA berupa dokumen sampai dengan tanggal 10 Desember 2020 sebagai berikut:
- a. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 78 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik.
 - b. DPA dan Program Kerja Seksi Postel dan Persandian.
 - c. Foto Palsan dan Sissan.
 - d. Foto Tempat Kegiatan Sandi.
 - e. Daftar SDM.
 - f. Dokumentasi Agenda Surat.
 - g. File Terima Kirim Via Sanapati.net.
 - h. Panduan Pelaporan Insiden Siber.
4. Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan pemeriksaan atas hasil penilaian mandiri, dokumen/berkas, sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan konfirmasi kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada angka 4, diperoleh **HASIL SEMENTARA** bahwa Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Urusan Persandian di Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo berada pada **Level II** dengan kategori tingkat kepatuhan **KURANG** (Skala Level I – Level V). dengan nilai tiap-tiap area adalah sebagai berikut:
- a. Tata Kelola dan Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian
Nilai: 30,67
 - b. Pengelolaan Sumber Daya Persandian;
Nilai: 71,82
 - c. Operasional Persandian.
Nilai: 52,86

HASIL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERSANDIAN			
Tingkat Kepatuhan			
Tata Kelola & Kerangka Kerja		30,67	
Pengelolaan SD Persandian		71,82	
Operasional Persandian		52,86	
Total Skor		51,78	dari maks 100
Kategori Tingkat Kepatuhan	Kurang		
Definisi Tingkat Kepatuhan			
Sangat Tinggi	91-100	level 5	
Tinggi	76-90	level 4	
Cukup	61-75	level 3	
Kurang	51-60	level 2	
Sangat Kurang	0-50	level 1	

Gambar 1. Hasil Pengawasan dan Pengendalian Persandian Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo

Tata Kelola dan Kerangka Kerja		30,67
Tata Kelola Penyelenggaraan Persandian	:	28,00
Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian	:	36,00
Pengelolaan SD Persandian		71,82
SDM Sandi	:	55,00
Materiil Sandi dan JKS	:	84,00
Kunci Sistem dan Bahan Sandi	:	82,86
Tempat Kegiatan Sandi	:	68,00
Operasional Persandian		52,86
Pembuatan Informasi Berklasifikasi	:	48,00
Pengiriman Informasi Berklasifikasi	:	50,00
Penyimpanan Informasi Berklasifikasi	:	60,00
Pemusnahan Informasi Berklasifikasi	:	0,00

Gambar 2. Nilai Per Area Audit Penyelenggaraan Persandian Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo

Demikian, Berita Acara ini dibuat dalam keadaan sebenarnya dan dengan mengingat Sumpah Jabatan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
2. Gubernur Provinsi Gorontalo; dan
3. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo.

RAHASIA

Mewakili PIHAK PERTAMA

Mohamad Nur Afif, S.ST.
NIP. 198701152007011001


Mewakili PIHAK KEDUA 

Freksi Gani, ST.MM
NIP. 19650505 199803 2 006

Mengetahui,
a.n Direktur Proteksi Pemerintah
Koordinator Audit Keamanan Informasi

Danang Jaya, S.Si., M.Kom
NIP. 19731230 199312 1 001

DOKUMENTASI KEGIATAN AUDIT PENYELENGGARAAN PERSANDIAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI GORONTALO



Participants (3)

- ATIF, BSN (Host) 001
- istandira (Co-host) 001
- KEMINFO PROVINSI GORONTALO 001

Microsoft Word - 1

CS : /j/ Tidak sesuai atau tidak berjalan sesuai peraturan

No	Kontrol Pengawasan	(Status Pemeriksaan)	(Catatan Hasil Pemeriksaan)
AREA 1 : TATA KELOLA & KERANGKA KERJA PENYELENGGARAAN PERSANDIAN			
Area ini mengontrol kerangka bentuk tata kelola keamanan informasi sesuai pembatasan akses/kegiatan/fungsi, terapan dan tanggung jawab pengelola Persandian serta mengontrol kelengkapan berbagai kerja berupa kebijakan dan standar operasional prosedur (SOP) Penyelenggaraan Persandian dan pengendalian informasi			
1	Apakah instansi Pemerintah telah memiliki Tata Kelola Persandian (UTP) sebagai standar unit kerja yang berfungsi untuk menyelenggarakan fungsi pelayanan Persandian dan Keamanan Informasi guna menunjang tugas instansi Pemerintah?	Tidak sesuai atau tidak berjalan sesuai peraturan	1. Diteng dengan 3 seksi terkait Persandian : Keamanan Informasi, nilai 5 2. Diteng dengan 2 seksi terkait Persandian dengan 1 seksi urusan nilai 3 3. Diteng atau 1 seksi terkait Persandian nilai 1
2	Apakah instansi Pemerintah telah memiliki Tata Kelola Persandian (UTP) sebagai standar unit kerja yang berfungsi untuk menyelenggarakan fungsi pelayanan Persandian dan Keamanan Informasi guna menunjang tugas instansi Pemerintah?	Tidak sesuai atau tidak berjalan sesuai peraturan	1. Diteng dengan 3 seksi terkait Persandian : Keamanan Informasi, nilai 5 2. Diteng dengan 2 seksi terkait Persandian dengan 1 seksi urusan nilai 3 3. Diteng atau 1 seksi terkait Persandian nilai 1
3	Apakah UTP yang telah ditetapkan Persandian telah mendapat dukungan yang memadai untuk Penyelenggaraan Persandian?	Tidak sesuai atau tidak berjalan sesuai peraturan	1. Diteng dengan 3 seksi terkait Persandian : Keamanan Informasi, nilai 5 2. Diteng dengan 2 seksi terkait Persandian dengan 1 seksi urusan nilai 3 3. Diteng atau 1 seksi terkait Persandian nilai 1
4	Apakah UTP yang telah ditetapkan Persandian telah mendapat dukungan yang memadai untuk Penyelenggaraan Persandian?	Tidak sesuai atau tidak berjalan sesuai peraturan	1. Diteng dengan 3 seksi terkait Persandian : Keamanan Informasi, nilai 5 2. Diteng dengan 2 seksi terkait Persandian dengan 1 seksi urusan nilai 3 3. Diteng atau 1 seksi terkait Persandian nilai 1
5	Apakah UTP yang telah ditetapkan Persandian telah mendapat dukungan yang memadai untuk Penyelenggaraan Persandian?	Tidak sesuai atau tidak berjalan sesuai peraturan	1. Diteng dengan 3 seksi terkait Persandian : Keamanan Informasi, nilai 5 2. Diteng dengan 2 seksi terkait Persandian dengan 1 seksi urusan nilai 3 3. Diteng atau 1 seksi terkait Persandian nilai 1
6	Apakah UTP yang telah ditetapkan Persandian telah mendapat dukungan yang memadai untuk Penyelenggaraan Persandian?	Tidak sesuai atau tidak berjalan sesuai peraturan	1. Diteng dengan 3 seksi terkait Persandian : Keamanan Informasi, nilai 5 2. Diteng dengan 2 seksi terkait Persandian dengan 1 seksi urusan nilai 3 3. Diteng atau 1 seksi terkait Persandian nilai 1
7	Apakah UTP yang telah ditetapkan Persandian telah mendapat dukungan yang memadai untuk Penyelenggaraan Persandian?	Tidak sesuai atau tidak berjalan sesuai peraturan	1. Diteng dengan 3 seksi terkait Persandian : Keamanan Informasi, nilai 5 2. Diteng dengan 2 seksi terkait Persandian dengan 1 seksi urusan nilai 3 3. Diteng atau 1 seksi terkait Persandian nilai 1
8	Apakah UTP yang telah ditetapkan Persandian telah mendapat dukungan yang memadai untuk Penyelenggaraan Persandian?	Tidak sesuai atau tidak berjalan sesuai peraturan	1. Diteng dengan 3 seksi terkait Persandian : Keamanan Informasi, nilai 5 2. Diteng dengan 2 seksi terkait Persandian dengan 1 seksi urusan nilai 3 3. Diteng atau 1 seksi terkait Persandian nilai 1
9	Apakah UTP yang telah ditetapkan Persandian telah mendapat dukungan yang memadai untuk Penyelenggaraan Persandian?	Tidak sesuai atau tidak berjalan sesuai peraturan	1. Diteng dengan 3 seksi terkait Persandian : Keamanan Informasi, nilai 5 2. Diteng dengan 2 seksi terkait Persandian dengan 1 seksi urusan nilai 3 3. Diteng atau 1 seksi terkait Persandian nilai 1
10	Apakah UTP yang telah ditetapkan Persandian telah mendapat dukungan yang memadai untuk Penyelenggaraan Persandian?	Tidak sesuai atau tidak berjalan sesuai peraturan	1. Diteng dengan 3 seksi terkait Persandian : Keamanan Informasi, nilai 5 2. Diteng dengan 2 seksi terkait Persandian dengan 1 seksi urusan nilai 3 3. Diteng atau 1 seksi terkait Persandian nilai 1
11	Apakah UTP yang telah ditetapkan Persandian telah mendapat dukungan yang memadai untuk Penyelenggaraan Persandian?	Tidak sesuai atau tidak berjalan sesuai peraturan	1. Diteng dengan 3 seksi terkait Persandian : Keamanan Informasi, nilai 5 2. Diteng dengan 2 seksi terkait Persandian dengan 1 seksi urusan nilai 3 3. Diteng atau 1 seksi terkait Persandian nilai 1
12	Apakah UTP yang telah ditetapkan Persandian telah mendapat dukungan yang memadai untuk Penyelenggaraan Persandian?	Tidak sesuai atau tidak berjalan sesuai peraturan	1. Diteng dengan 3 seksi terkait Persandian : Keamanan Informasi, nilai 5 2. Diteng dengan 2 seksi terkait Persandian dengan 1 seksi urusan nilai 3 3. Diteng atau 1 seksi terkait Persandian nilai 1
13	Apakah UTP yang telah ditetapkan Persandian telah mendapat dukungan yang memadai untuk Penyelenggaraan Persandian?	Tidak sesuai atau tidak berjalan sesuai peraturan	1. Diteng dengan 3 seksi terkait Persandian : Keamanan Informasi, nilai 5 2. Diteng dengan 2 seksi terkait Persandian dengan 1 seksi urusan nilai 3 3. Diteng atau 1 seksi terkait Persandian nilai 1
14	Apakah UTP yang telah ditetapkan Persandian telah mendapat dukungan yang memadai untuk Penyelenggaraan Persandian?	Tidak sesuai atau tidak berjalan sesuai peraturan	1. Diteng dengan 3 seksi terkait Persandian : Keamanan Informasi, nilai 5 2. Diteng dengan 2 seksi terkait Persandian dengan 1 seksi urusan nilai 3 3. Diteng atau 1 seksi terkait Persandian nilai 1